



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, peneliti memilih referensi penelitian terdahulu yang terkait dengan penerapan agenda media. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan adalah skripsi dengan judul “*Agenda Media Dalam Pemberitaan Pemilu Presiden 2014 Pada Koran Sindo*” oleh Nur Laily dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2014, dan penelitian kedua adalah berjudul “*Representasi Agenda Media Dalam Surat Kabar Nasional Kompas dan Koran Tempo*” oleh Diana Patricia Manulong dari Universitas Indonesia tahun 2012.

Pada penelitian yang pertama, Laily melakukan penelitian mengenai peran agenda media surat kabar Sindo dalam menghimpun kekuatan opini publik terkait pemberitaan pasangan dua calon dan calon wakil presiden pada pemilu presiden 2014. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana politik redaksional serta agenda pemberitaan Koran Sindo terhadap pemberitaan dua pasangan calon dan calon wakil presiden pada pemilu presiden 2014.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Laily menunjukkan bahwa politik redaksi dalam Koran Sindo tidak jauh berbeda dengan politik redaksi koran lainnya, yang dalam pengolahan dan pengemasan beritanya terdapat campur

tangan dari para elit media seperti pemilik, pemegang saham, dan penyedia modal. Selain itu, *headline* (HL) merupakan aspek dari suatu pemberitaan yang menunjukkan kecenderungan berita atau isu tertentu.

Pada penelitian kedua, Manulong melakukan penelitian mengenai peran agenda media yang dilakukan Koran Kompas dan Koran Tempo dalam mengangkat isu lingkungan dalam pemberitaannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui isu-isu lingkungan yang diberitakan sebagai agenda media, serta untuk mengetahui orientasi pemberitaan isu lingkungan oleh Koran Kompas dan Koran Tempo.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Manulong menunjukkan bahwa adanya penonjolan isu lingkungan yang dilakukan agenda media Koran Kompas dan Koran Tempo, namun orientasi isu lingkungan yang digambarkan oleh kedua koran tersebut digambarkan secara sempit sehingga pembaca hanya mendapatkan informasi yang tidak cukup luas mengenai isu permasalahan lingkungan yang terjadi.

Peneliti akan melakukan penelitian dengan tema yang sama, yaitu melihat penerapan agenda media surat kabar Kompas dalam memberitakan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi proses penerapan agenda media yang dilakukan surat kabar Kompas dalam memberitakan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.

## 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

Nama	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Konsep	Metode Penelitian	Hasil
Nur Laily	Agenda Media Dalam Pemberitaan Pemilu Presiden 2014 Pada Koran Sindo	Untuk mengetahui bagaimana politik redaksional serta agenda pemberitaan Koran Sindo terhadap pemberitaan dua pasangan calon dan calon wakil presiden pada pemilu presiden 2014.	Media cetak koran	Kualitatif Deskriptif	Politik redaksi dalam Koran Sindo tidak jauh berbeda dengan politik redaksi koran lainnya, yang dalam pengolahan dan pengemasan beritanya terdapat campur tangan dari para elit media seperti pemilik, pemegang saham, dan penyedia modal. Selain itu, <i>headline</i> (HL) merupakan aspek dari suatu pemberitaan yang menunjukkan kecenderungan berita atau isu tertentu.
Diana Patricia Manulong	Representasi Agenda Media Dalam Surat Kabar Nasional Kompas dan Koran Tempo	Untuk mengetahui isu-isu lingkungan yang diberitakan sebagai agenda media, serta untuk	Media cetak koran	Kuantitatif Analisis Isi	Adanya penonjolan isu lingkungan yang dilakukan agenda media Koran Kompas dan Koran Tempo, namun orientasi isu lingkungan yang digambarkan

		mengetahui orientasi pemberitaan isu lingkungan oleh Koran Kompas dan Koran Tempo.			oleh kedua koran tersebut digambarkan secara sempit sehingga pembaca hanya mendapatkan informasi yang tidak cukup luas mengenai isu permasalahan lingkungan yang terjadi.
Livani Rizky Putri	Peranan Agenda Media Cetak:  Studi Kasus Agenda Media Kompas Dalam Pemberitaan Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan  Periode Mei – Juni 2016	Untuk mengidentifikasi proses penerapan agenda media yang dilakukan surat kabar Kompas dalam memberitakan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.	Media cetak koran	Kualitatif Deskriptif	-

U M N  
 UNIVERSITAS  
 MULTIMEDIA  
 NUSANTARA

## 2.2 Kerangka Teori

### 2.2.1 Teori *Agenda Setting* Media Massa

Sebuah *problem* yang terjadi di masyarakat dan menjadi agenda publik, kemudian bisa menjadi isu yang dianggap penting oleh media. Isu yang dianggap penting ini diberitakan berdasarkan konsep *agenda setting*.

*Agenda setting* media massa merupakan teori yang menjelaskan bahwa media memiliki kemampuan dalam memengaruhi perspektif atau cara pandang publik, dalam melihat dan menyikapi sebuah permasalahan.

Menurut teori ini, suatu isu yang dianggap penting dan diberitakan secara intensif oleh media, akan dianggap penting juga oleh masyarakat. Teori *agenda setting* diperkenalkan pertama kali oleh Maxwell McCombs dan Donald L. Shaw lewat tulisan mereka yang berjudul "*The Agenda Setting Function of Mass Media*". Becker, dkk (1975, dikutip dalam Cangara, 2009, h. 124) menjelaskan bahwa jika sebuah media menonjolkan atas suatu isu, efeknya adalah dapat memberi pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan opini publik.

Asumsi dari *agenda setting* didasari oleh dua hal. Pertama, pemberitaan yang dilakukan oleh media massa tidak merefleksikan realitas yang sebenarnya. Pemberitaan yang telah sampai pada publik melewati proses penyaringan dan pembentukan informasi terlebih dahulu. Kedua, fokus media pada isu tertentu berdasarkan penonjolan pada subjek tertentu, sehingga suatu isu yang diangkat oleh media massa menjadi lebih penting daripada isu yang lain.

Little John (2013, dikutip dalam Tamburaka, h. 68) menyebut bahwa teori *agenda setting* beroperasi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Agenda Media

Agenda media harus diformat, sebuah proses akan menimbulkan masalah bagaimana agenda media terjadi pertama kali dengan unsur-unsur yang berkaitan, yaitu: penonjolan berita (*visibility*), yakni tingkat menonjolnya berita, penonjolan berita pada khalayak (*audience salience*), dan valensi (*valence*) yakni menyenangkan atau tidak suatu cara pemberitaan 'mengemas' sebuah peristiwa.

2. Agenda Khalayak

Dalam banyak hal, agenda media memengaruhi atau berinteraksi pada agenda publik atau kepentingan isu tertentu bagi publik. Unsur-unsur yang meliputi agenda khalayak mencakup familiar atau tidaknya pemberitaan di tengah khalayak (*familiarity*), kedekatan (*proximity*), bersinggungan dengan pribadi khalayak (*personal salience*), dan senang atau tidaknya khalayak pada pemberitaan oleh media (*favorability*).

3. Agenda Kebijakan

Agenda publik memengaruhi dan berinteraksi dengan agenda kebijakan, yang memiliki pengaruh pada pembuatan kebijakan publik dan dianggap penting bagi individu. Unsur-unsur yang meliputi agenda kebijakan yaitu dukungan terhadap isu yang diberitakan media (*support*), peluang kegiatan yang diberikan oleh media atas sebuah pemberitaan (*likelihood of action*), dan nilai yang akan dijalankan oleh pemerintah tentang isu yang sedang mencuat dalam publik (*freedom of action*).

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan salah satu bagian dalam *agenda setting*, yakni agenda media yang mencakup pada *visibility* (penonjolan berita), *audience salience* (penonjolan berita pada khalayak), dan *valence* (valensi pengemasan suatu pemberitaan).

### 2.2.2 Agenda Media

Agenda media merupakan konsep yang diambil dalam teori *agenda setting*. Menurut Nurudin (2014, h. 196), agenda media mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam memengaruhi perspektif masyarakat dan dapat menjadi agenda publik.

Agenda media mencakup pada tiga hal, yakni tingkat penonjolan berita (*visibility*), penonjolan berita pada khalayak (*audience salience*), dan valensi (*valence*) yaitu menyenangkan atau tidak pengemasan suatu pemberitaan.

#### 2.2.2.1 *Visibility*

Penonjolan berita (*visibility*) adalah tingkat penonjolan suatu isu pada suatu pemberitaan. Penonjolan berita dapat diukur berdasarkan jumlah berita dan tingkat menonjolnya berita.

#### 2.2.2.2 *Audience Salience*

Penonjolan berita pada khalayak (*audience salience*) adalah tingkat penonjolan bagi publik. Sebuah isu yang diberitakan harus memenuhi adanya 'nilai pemberitaan'. Aspek-aspek yang termasuk dalam berita adalah *prominence*, *human interest*, *conflict/ controversy*, *unsual*, dan *proximity*. Sebuah isu harus

memenuhi aspek-aspek tersebut agar dapat dijadikan sebagai berita oleh media (Macdougall, 1997, dikutip dalam Eriyanto, 2002, h. 102).

1. *Prominence*

*Prominence* merupakan seberapa penting atau seberapa darurat suatu isu, dilihat berdasarkan seberapa besar isu tersebut terjadi.

2. *Human Interest*

*Human interest* merupakan unsur-unsur yang terkandung dalam suatu isu, biasanya memiliki unsur emosional bagi publik seperti kesedihan dan kemarahan.

3. *Conflict/ Controversy*

*Conflict/ controversy* merupakan suatu unsur yang terkandung dalam suatu isu, memiliki permasalahan atau konflik yang menjadi penting untuk diberitakan.

4. *Unusual*

*Unusual* merupakan suatu isu yang jarang terjadi atau tidak biasa.

5. *Proximity*

*Proximity* merupakan suatu isu yang memiliki kedekatan pada publik, baik fisik dan emosional.

U M M N  
UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA

### 2.2.2.3 Valence

Pengemasan suatu pemberitaan (*valence*) adalah cara pemberitaan suatu isu apakah isu tersebut diberitakan secara menyenangkan atau tidak menyenangkan. Cara pemberitaan tersebut dilihat berdasarkan tiga hal yang akan menentukan arah pemberitaan:

1. *Favorable*

*Favorable*, atau disebut sebagai pemberitaan bernada positif.

Sebuah pemberitaan dapat dikatakan positif berdasarkan kalimat-kalimat terkait seperti pujian, persetujuan, atau dukungan terhadap suatu isu.

2. Netral

Pemberitaan bernada netral dilontarkan secara baik, tanpa memihak atau mendukung pihak-pihak tertentu dalam sebuah isu.

3. *Unfavorable*

*Unfavorable*, atau disebut sebagai pemberitaan bernada negatif.

Sebuah pemberitaan dapat dikatakan negatif berdasarkan kalimat-kalimat terkait seperti celaan, meremehkan, atau kontra terhadap suatu isu.

Dalam agenda media, Severin dan Tankard (2013, dikutip dalam Tamburaka, h. 39) mengatakan bahwa adanya proses yang disebut *priming*, yaitu proses di mana media berfokus mengutamakan salah satu isu dalam pemberitaannya. *Priming* dilihat dari perspektif situasional dan kontekstual.

Situasional yakni dapat berlaku dalam situasi tertentu yang membutuhkan perhatian publik secara besar, dan kontekstual yakni hanya berlaku pada isu atau konteks masalah tertentu.

Dengan kata lain, *priming* adalah proses bagaimana media menganggap sebuah isu dan diberitakan sepanjang waktu tertentu agar menjadi perhatian publik, dan yang terpenting adalah hal apa yang diutamakan dalam isu tertentu tersebut. (Tamburaka, 2013, h. 42).

Konstruksi realitas sosial juga tak lepas dari suatu agenda media. Konstruksi realitas sosial merupakan penggambaran proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, di mana dalam konteks ini, yaitu media massa, menciptakan secara terus menerus sebuah realitas yang dialami bersama secara subjektif, dan realitas yang terkonstruksi membentuk opini massa (Tamburaka, 2013, h. 75).

Bungin (2013, dikutip dalam Tamburaka, h. 78- 82) menjelaskan bahwa konstruksi realitas sosial media massa terbentuk atas beberapa tahapan penting:

1. Tahap menyiapkan materi konstruksi

Materi konstruksi sosial media massa merupakan tugas pada redaksi. Tugas tersebut kemudian didistribusikan pada masing-masing *desk* editor. Isu-isu penting yang menjadi fokus media massa adalah persoalan sensitivitas, sensualitas, dan kengerian. Isu-isu ini berdasarkan keberpihakan media pada tiga hal, yaitu kapitalisme, masyarakat, dan kepentingan umum.

## 2. Tahap sebaran konstruksi

Sebaran konstruksi media massa dilakukan melalui strategi media massa, yang di mana terdapat perbedaan strategi dan masing-masing media, namun prinsip utamanya tetap lah *real time*. Pada media cetak, yang dimaksud dengan *real time* terdiri dari beberapa konsep terbitan, seperti harian, mingguan, atau bulanan.

## 3. Tahap pembentukan konstruksi

Setelah pemberitaan sampai pada masyarakat, pembentukan konstruksi dibentuk melalui tiga tahap. *Pertama*, konstruksi realitas membenaran, *kedua*, kesediaan dikonstruksi oleh media massa, *ketiga*, sebagai pilihan konsumtif.

Konstruksi realitas membenaran merupakan suatu bentuk konstruksi media massa yang terbangun di masyarakat, cenderung membenarkan apa saja yang diberitakan oleh media massa sebagai realitas kebenaran.

Pada kesediaan dikonstruksi media massa, pilihan seseorang untuk membaca/ mencari informasi dari media tertentu semata-mata adalah pilihannya bersedia agar pikirannya dikonstruksi media massa. Dalam pilihan konsumtif, kebiasaan seseorang mengonsumsi media tertentu berdasarkan atas kebiasaannya yang tidak bisa lepas dari adanya media massa.

## 4. Tahap konfirmasi

Konfirmasi merupakan tahapan di mana media massa dan masyarakat memberi argumentasi terhadap pilihannya, untuk terlibat dalam pembentukan konstruksi. Bagi media, tahap ini perlu sebagai bagian

untuk memberi argumentasi terhadap alasan mereka mengonstruksi berita.

Umumnya, nilai yang dikonstruksi media massa merupakan nilai yang bersumber dari petinggi medianya, seperti redaktur dan masing-masing *desk*. Media massa adalah replikasi dari masyarakat di sekitarnya, dan diwakilkan oleh nilai-nilai dan norma yang ada pada petinggi media tersebut (Tamburaka, 2013, h. 83).

Sebuah media bukan hanya memberikan informasi dan hiburan saja, tetapi juga memberikan pengetahuan pada khalayak, sehingga proses berpikir dan cara menganalisa sesuatu akan terbawa pada kerangka berpikir sosial, dan membentuk sebuah kebijakan publik, yang merupakan implikasi dari proses yang dilakukan elemen-elemen tersebut (Tamburaka, 2013, h. 84).

Terdapat berbagai macam isu yang biasanya diangkat oleh media, kemudian isu tersebut ditonjolkan agar mendapat perhatian lebih dari publik. Salah satu isu yang biasanya menarik dan diangkat oleh media massa adalah isu mengenai konflik. Konflik fisik seperti perang, atau kekerasan dianggap memiliki nilai berita karena adanya korban yang dirugikan. Kekerasan mampu memicu emosi khalayak yang menyimak beritanya (Ishwara, 2007, h. 53).

Kekerasan merupakan sebuah kata dengan arti dan makna “derita”, baik dilihat secara ilmu psikologi ataupun hukum. Kekerasan merupakan perilaku seseorang/ kelompok yang dapat menimbulkan penderitaan baik pribadi atau kelompok (Pasalbessy, 2010, h. 9).

### 2.2.3 Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Kekerasan adalah sebuah serangan yang dilakukan pada seseorang, baik secara fisik maupun psikis. Kekerasan yang terjadi pada dasarnya berasal dari berbagai faktor. Salah satu faktor yang paling banyak memicu adanya kekerasan biasanya terjadi akibat adanya bias gender atau *gender related violence*, akibat adanya ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Bias gender tersebut terjadi pada masyarakat yang memiliki paham patriarkis, yakni menganggap posisi perempuan berada di bawah lelaki (Fakih, 1996, dikutip dalam Astuti, 2002, h.77).

Secara lebih khusus *Volunteer Comitee* (1986, dikutip dalam Astuti, 2002, h. 77) menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan mengacu pada usaha untuk mengintimidasi, baik secara fisik seperti menyerang tubuh atau verbal seperti menghina perempuan. Tujuannya adalah agar perempuan berada di bawah kendali lelaki atau untuk memberikan rasa takut.

Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 1993 mengadopsi deklarasi tentang kekerasan terhadap perempuan oleh Komisi Status Perempuan PBB 1992, disebutkan bahwa “*Kekerasan terhadap perempuan mencakup setiap perbuatan kekerasan atas dasar perbedaan kelamin, yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan terhadap perempuan baik secara fisik, seksual, maupun psikis, baik terjadi dalam lingkungan yang bersifat publik maupun privat.*”

Tindak kekerasan yang sering terjadi pada perempuan meliputi serangan seksual, pembunuhan, pornografi, dan tindak kekerasan secara fisik. Pada kasus kekerasan pada anak, biasanya si anak diposisikan menjadi individu yang tidak berdaya.

Kejahatan seksual atau pelecehan seksual merupakan dua bentuk pelanggaran dari norma kesusilaan. Masalah mengenai kejahatan seksual sudah tidak lagi menjadi masalah hukum secara nasional saja, tetapi juga sudah menjadi masalah global dunia di masing-masing negara. Pelaku pelecehan seksual sendiri sudah meliputi berbagai kalangan, mulai dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Di Indonesia, perempuan merupakan kaum dengan jender yang paling sarat menjadi korban kekerasan (Sumera, 2013, h. 40).

Perempuan menjadi korban yang rentan atas berbagai masalah sensitif yang terjadi di masyarakat, antara lain seperti kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Hal ini terjadi karena perempuan seringkali dijadikan objek yang hak-haknya dikebiri dan dilecehkan, dan tidak hanya terjadi pada perempuan dewasa melainkan juga anak-anak (Sumera, 2013, h. 40).

Pelecehan seksual merupakan terminologi dari pemahaman mengenai kekerasan seksual. Cakupan mengenai pelecehan seksual cukup luas, mulai dari tindak verbal seperti berkomentar atau gurauan, tindak fisik seperti perlakuan tidak senonoh. Ancaman dalam perilaku pelecehan seksual tak jarang disertai dengan ancaman agar pihak perempuan merasa takut dan tidak berani untuk menolak, atau melawan keinginan pelaku yang biasanya merugikan perempuan (Sumera, 2013, h. 43).

Salah satu tindakan yang dapat digolongkan menjadi tindakan pelecehan seksual adalah perkosaan. Menurut Pasal 285 KUHP, perkosaan merupakan sebuah kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan. Perkosaan dilihat sebagai suatu tindak kejahatan yang dinilai sangat merugikan dan mengganggu ketentraman dan ketertiban hidup, terutama bagi korbannya.

Berbagai macam efek buruk ditimbulkan pada korban dari adanya tindak perkosaan. Secara beban psikis, korban akan menyalahkan diri sendiri atas kejadian perkosaan yang terjadi, memiliki keinginan untuk membunuh diri sendiri, gangguan makan, *hypoactive sexual desire disorder*, yaitu sebuah kondisi apatisme seksual di mana korban mengalami hasrat seksual rendah, gangguan kecemasan berlebihan, serta depresi (Quamila, 2017, para. 7).

Tidak hanya psikologis, fisik pada korban juga akan mengalami dampak dari tindak perkosaan. Akibat yang ditimbulkan antara lain adalah, nyeri yang terjadi saat berhubungan seksual pada organ intim, memiliki resiko lebih tinggi pada penyakit diabetes, cacat fisik seperti memar atau kerusakan tertentu pada fisik (bila pada saat kejadian pelaku juga serta melakukan tindak kekerasan lain, contohnya memukul), dan yang paling fatal adalah kehilangan nyawa pada korban (Quamila, 2017, para. 30).

U N I V E R S I T A S  
M U L T I M E D I A  
N U S A N T A R A

## 2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menjelaskan mengenai alur pemikiran penelitian agenda media pemberitaan kasus YY yang dilakukan Kompas periode Mei-Juni 2016, terkait pada kasus kekerasan anak dan perempuan.

